



**Judul** : Pembahasan RUU PPRT, bikin sistem efektif lindungi pekerja  
**Tanggal** : Sabtu, 23 Agustus 2025  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 3

## Pembahasan RUU PPRT Bikin Sistem Efektif Lindungi Pekerja

WAKIL Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Sturman Panjaitan mendorong peran aktif Pemerintahan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Salah satunya, dalam aspek pembinaan dan pengawasan.

Dia mengingatkan agar RUU PPRT tidak sekadar formalitas, melainkan menjadi payung hukum yang benar-benar melindungi jutaan pekerja rumah tangga di Indonesia.

"Kalau di naskah disebut pengawasan dilakukan Pemerintah Pusat dan Daerah, itu harus detail. Jangan sampai Pemerintah hanya diam saja," ujar Sturman di Jakarta, Kamis (21/8/2025).

Sturman mencontohkan sistem di Hong Kong yang efektif melindungi pekerja migran. Di sana, pekerja wajib tercatat di KJRI, kontrak kerja dibuat jelas dalam berbagai bahasa, gaji minimum dijamin, bahkan tersedia shelter resmi bagi yang bermasalah.

Senada, anggota Baleg Habib Syarief Muhammad menilai, draf RUU masih lemah dalam menjamin kepastian hukum. Diusulkan penambahan frasa

"pelindungan hukum" serta memasukkan klausul terkait pelanggaran HAM terhadap pekerja rumah tangga.

"Hal tersebut bisa mencegah setiap bentuk pelanggaran," tegasnya.

Habib juga meminta ruang lingkup pekerjaan tidak terlalu

membatasi. Kata "meliputi" harus diganti "antara lain" agar jenis pekerjaan baru tetap terlindungi. Lalu, pengakhiran hubungan kerja sebaiknya hanya untuk pelanggaran berat, bukan alasan sepele.

Wakil Ketua Baleg Martin Manurung menyoroti aspek perekrutan. Menurutnya, draf terbaru sudah memisahkan mekanisme perekrutan langsung dan lewat agen penyalur. Hak dan kewajiban setiap pihak akan diatur secara detail.

"Jika perekrutannya langsung, itu berdasarkan kesepakatan," jelas politikus NasDem itu.

Martin bilang, RUU kali ini lebih ramping dibanding periode sebelumnya. Pasal pidana yang sudah tercakup dalam KUHP tidak lagi diulang, sehingga fokus hanya pada aspek spesifik perlindungan PRT. Dia juga menepis kekhawatiran bahwa aturan akan tertinggal dari perkembangan teknologi.

"Karena kita berangkat dari nol, dari ketiadaan regulasi. Aturan dasar perlu dibuat dulu, kemudian disesuaikan dengan dinamika baru seperti aplikasi perekrutan online," katanya.

RUU PPRT sudah diajukan sejak 2004 tapi pembahasannya selalu mandek. Pada periode DPR 2024-2029, RUU ini kembali masuk Prolegnas Prioritas 2025. Presiden Prabowo Subianto bahkan sempat berjanji dalam pidato Hari Buruh 1 Mei 2025 bahwa RUU PPRT akan dibereskan dalam tiga bulan. ■ PYB